

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan Kewarganegaraan adalah dasar dari gagasan mengenai warga negara yang ideal membina peserta didik menjadikan manusia yang berjiwa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air. Dengan kata lain PKn merupakan pendidikan karakter sebagai ontologi atau substansi fokus pembelajaran dan kajian keilmuannya pada perilaku individu warga negara baik dalam kehidupan berbangsa serta bernegara (Winataputra, 2012)

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang termasuk dalam bingkai NKRI melalui PKn memiliki tujuan dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan tersebut tentunya memiliki muatan kompetensi dalam PKn, seperti: (1) Kritis dalam berpikir, bertindak rasional, dan menanggapi isu kewarganegaraan secara kreatif, (2) Bertanggung jawab dan turut berpartisipasi secara kualitas, mempunyai aksi yang jenius dalam aktivitas warga, berbangsa serta bernegara, (3) Adanya perkembangan pemikiran positif pada diri seorang manusia yang berkarakter bangsa dalam menjalani hidup bersama khususnya Indonesia dan berdampingan dengan bangsa lain, (4) Adanya interaksi dengan bangsa lain baik secara langsung atau tidak dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi.

Struktur dalam keilmuan PKn sejalan dengan pendapat Adnan dalam Hisarma, dkk (2022), dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut: Pertama dalam komponen pengetahuan (*civic knowledge*), cakupannya yaitu dalam bidang politik, dan hukum serta moral. Secara khusus, pengetahuan kewarganegaraan adalah pengetahuan tentang berbagai prinsip proses demokrasi, institusi negara hukum, tatanan hukum yang merdeka dan tidak memihak, konstitusi, sejarah bangsa, hak dan kewajiban warga negara, dan pengetahuan mengenai manusia. Kedua dalam komponen yang berkaitan dengan keterampilan (*civic skill*) yang

tentunya perlu dimiliki oleh warga negara diantaranya adalah intelektual, keterampilan, sosial, partisipatif. Keterampilan kognitif sangat penting dalam terbentuknya warga negara yang memiliki wawasan luas, efektif dan bertanggung jawab, diantaranya memiliki keterampilan dalam berpikir secara kritis dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan.

Keterampilan sosial merupakan keterampilan bermasyarakat agar seseorang sebagai warga negara dapat menjalankan hak-haknya dalam menunaikan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dalam suatu pemerintahan. Sedangkan keterampilan partisipatif yaitu warga negara yang memiliki wawasan luas, efektif dan memiliki rasa tanggung jawab dalam proses politik dan masyarakat sipil seperti keterampilan berinteraksi, memantau dan mempengaruhi. Ketiga dalam komponen (*civic disposition*) yaitu watak dari kewarganegaraan yang tentunya sangat diperlukan dalam memperbaiki moral warga negara. Komponen ini meliputi ciri-ciri watak pribadi seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan rasa hormat terhadap nilai dan martabat kemanusiaan.

Pendidikan karakter yang merupakan sebagai upaya dalam perbaikan kualitas pendidikan khususnya di negara Indonesia. Proses pendidikan selama ini dinilai belum berhasil dalam membangun manusia yang memiliki pribadi yang karakter. Hal ini didasari masih banyaknya ditemukan lulusan sekolah yang memiliki intelektual tinggi, namun tidak memiliki perilaku yang mulia sesuai tujuan dari pendidikan tersebut. Perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan tersebut misalnya, masih banyaknya terjadi kasus tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan yang memiliki pendidikan serta intelektual tinggi, serta masih banyaknya perilaku yang menyimpang dilakukan oleh remaja sehingga membuat resah masyarakat di dalam lingkungannya. Pendidikan karakter yang memiliki peran penting sebagai pencetak moral anak bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan. Dengan adanya moral meminta dunia pendidikan untuk dapat merumuskan tentang konsep

pendidikan karakter, hal ini tentunya bertujuan dalam membentuk dan memperbaiki karakter yang semakin lama semakin menurun (Fadila, 2021).

Pentingnya pendidikan karakter sesungguhnya sudah tercermin di dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 3 yang berisikan bahwa: Pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk kemampuan dan watak atau sikap untuk mencerdaskan kehidupan manusia, dan membentuk peradaban bangsa, serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat dan berpengetahuan. Menjadi warga negara yang kompeten, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh pasal 3 dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat dipahami bahwa negara Indonesia memiliki tujuan pendidikan dalam membentuk kepribadian setiap peserta didik. Dapat kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan nasional tidak hanya dalam kognitif saja melainkan mampu mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang memiliki keterampilan dan berkarakter yang baik (Keraf, 2019).

Lembaga pendidikan menjadi salah satu kunci utama dari pendidikan karakter dan penanaman akhlak peserta didik. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai bapak pendidikan, beliau mengartikan pendidikan menjadi upaya dalam memajukan budi pekerti, dan pemikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kehidupan yang sempurna dengan lingkungan alam dan masyarakat (Dalyono & Enny Dwi Lestariningsih, 2017). Dalam mencapai tujuan pendidikan dibutuhkan pendidikan karakter yang berupa nilai-nilai dan norma-norma guna mengarahkan perilaku seorang anak untuk menjadi pribadi yang berkarakter yang lebih baik (Wulandari et al., 2017).

Sekolah menjadi wadah dalam pembentukan karakter dari peserta didik untuk menjawab tantangan zaman di era globalisasi seperti sekarang ini. Sekolah harus mampu mengendalikan perkembangan jaman dengan menguatkan karakter dari peserta didik, karena diketahui bahwa generasi yang rentan berpengaruh terhadap dinamika adalah generasi muda terutama peserta didik yang berada

dibangku persekolahan. Zubaedi (2017), mengungkapkan bahwa karakter menjadi hal yang esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter ini akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa ini. Karakter sangatlah berperan sebagai pengendali dan menjadi kekuatan dari pengaruh zaman yang semakin pesat seperti saat ini.

Pengintegrasian nilai-nilai karakter bangsa dalam setiap mata pelajaran diperlukan karena kesadaran bahwa permasalahan karakter bangsa menjadi urgensi pada jenjang pendidikan. Generasi muda diharapkan dapat memberikan sumbangsi atau kontribusi partisipasi aktif mereka dalam setiap aspek kehidupan, dan mereka akan mengambil bagian dalam pembangunan Indonesia ketika Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan yang ke seratus tahun 2045. Namun, upaya pemerintah untuk menanamkan perlunya pembangunan karakter untuk meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa yang terkesan dekaden belum begitu membuahkan hasil (Lonto, 2019).

Berdasarkan pendapat Sumantri (2011:3) dijelaskan bahwa “Karakter merupakan suatu sikap, perilaku, tabiat, adab yang dibentuk dari seseorang yang merupakan hasil dari adanya internalisasi sebagai suatu kebajikan (*virtues*)”. Lickona dalam (Komalasari dan Saripudin 2017:16) mengemukakan bahwa “*deliberate effort to help people about, and act upon core ethical values*”. Atau dapat diartikan sebagai pendidikan karakter yang memberikan pandangan yang dimengerti untuk seseorang, dan peduli, serta dalam melakukan sesuatu yang beretika dan sesuai dengan nilai-nilai. Karakter dari warga negara merupakan cerminan kepribadian bangsa dari negara tersebut.

Karakter kewarganegaraan yang hilang yang memunculkan fundamental dan keegoisan yang pada ujungnya dapat memicu adanya kriminalitas yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Krisis karakter terhadap kewarganegaraan tentunya harus ditangani dengan cara struktural oleh kita bersama yaitu khususnya Indonesia. Selain itu lembaga yang memiliki peran di bidang pendidikan maupun dari *stakeholder* pada bidang pendidikan yang lebih bersifat proaktif. Proses pembelajaran yang kreatif serta berinovatif tentunya akan

memberikan kontribusi yang benar-benar mampu dalam pembangunan pendidikan karakter yang secara perspektif dirancang dalam bentuk holistik dan secara kontekstual yang dapat memberikan pemikiran secara dialogis yang tentunya bersifat kritis untuk menjadikan manusia yang memiliki karakter baik dalam keluarga, sekolah, maupun warga negara (Mulyono, 2017).

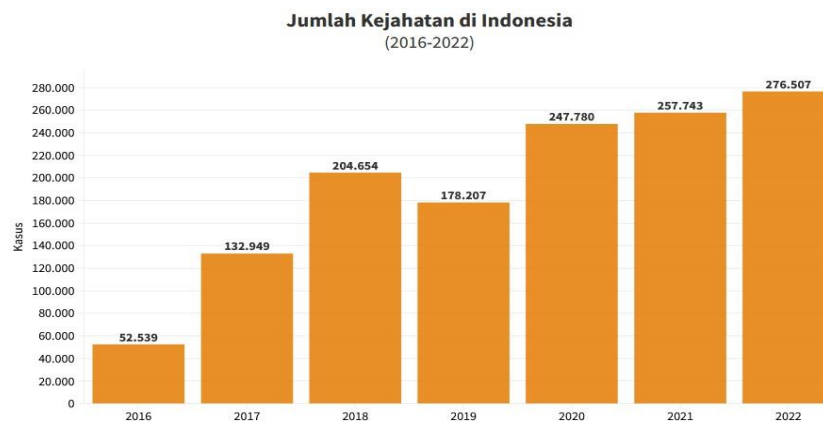
Permasalahan yang masih ada dalam aspek pendidikan di Indonesia tampaknya menjadi hal yang mendesak untuk diselesaikan. Ini masalah berakar pada SDM yang berkualitas dalam membina guru dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Rendahnya kompetensi guru tersebut diduga menjadi penyebab utama rendahnya mutu pendidikan. Lingkaran setan ini menyebabkan rendahnya SDM (peserta didik) yang lulus dari sekolah. Sagala (2009:21), menjelaskan bahwa tenaga pendidik yang dapat diartikan secara sederhana adalah sebagai orang yang memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Tugas dalam mentransfer pengetahuan meningkatkan citra. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi di masyarakat tentang urgensi guru bagi peserta didik. Masyarakat menaruh kepercayaan kepada guru untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi berakhlak mulia, terdidik, cerdas, dan berkepribadian baik (Lonto, 2019).

*Civic disposition* merupakan suatu porsi utama dalam menjalani kehidupan terutama dalam bidang pendidikan. Pentingnya *civic disposition* dalam pembentukan watak peserta didik yang bertujuan menjadi warga negara yang bisa memiliki jati diri baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara (Rahmatiani & Saylendra, 2021). Maka dalam hal ini *civic disposition* memiliki tujuan utama untuk membina karakter dari warga negara. Kebutuhan akan *civic disposition* dirasa mendesak untuk dilakukan secara optimal karena pembentukan warga negara yang baik dan cerdas harus mempertimbangkan secara matang perkembangan moral setiap warga negara (Sarkadi & Fadhillah, 2020).

*Civic disposition* atau yang disebut dengan watak kewarganegaraan yang menjadi bentuk dari kualitas diri dari seseorang yang termasuk dalam karakter dan kualitas moral seseorang tersebut. *Civic disposition* memiliki fungsi sebagai dasar dari memberikan penilaian moral dari seseorang. *Civic disposition*

merupakan sebagai rasa dari kepedulian akan hak dan kewajiban serta kesejahteraan dari orang lain yang peka terhadap lingkungannya, saling menghargai dan menghormati antar sesama, dan memiliki rasa tanggung jawab. Warga negara yang memiliki karakter baik tentunya masa akan datang dari suatu negara akan baik dan maju pula, dan begitu pula sebaliknya jika adanya warga negara yang memiliki karakter tidak baik maka masa akan datang dari negara itu tentunya untuk sulit maju dan berkembang (Atmaja & Info, 2022). Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam pembentukan *civic disposition* pada peserta didik diantaranya watak sebagai sikap, budi pekerti, dan nilai-nilai luhur yang menitikberatkan pada pembentukan nilai-nilai ketakwaan, kesopanan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kejujuran (Pasandaran et al., 2018).

Timbulnya fenomena yang dinilai buruk pada watak kewarganegaraan dapat dilihat dari rendahnya tingkat kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kesantunan telah menyebar ke seluruh aspek kehidupan di Indonesia, fenomena ini dianggap sebagai salah satu faktor yang memperumit masalah yang dihadapi Indonesia saat ini, termasuk krisis moral dan akhlak, pelanggaran hukum, pelanggaran hak asasi manusia, konflik sosial budaya, penyelewengan hukum, korupsi, dan nepotisme serta kejahatan lainnya. Berikut adalah jumlah data kejahatan di Indonesia dari tahun 2016-2022 dapat dilihat dari diagram dibawah ini:



Gambar 1.1 Data Kejahatan di Indonesia

(Sumber: Sumber Data Indonesia.Id)

Ahmad Bakri, 2023

**PENERAPAN KARTU KONTROL PERATURAN SEKOLAH DALAM PEMBENTUKAN CIVIC DISPOSITION PESERTA DIDIK (STUDI KASUS SMA NEGERI BERNAS BINSUS PROVINSI RIAU)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada diagram tersebut berdasar catatan Polri menunjukkan ada 276.507 kasus kejahatan sepanjang tahun 2022. Jumlah kasus kejahatan yang diselesaikan sebanyak 1.877 atau 0,9% dari tahun sebelumnya. Satu Kasus kejahatan di Indonesia terjadi dalam waktu 2 menit 2 detik, dan jika dihitung dengan jam terdapat 31,6 kejahatan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa adanya peningkatan kasus kejahatan di Indonesia setiap tahunnya dan harus ditanggapi dengan serius.

Maraknya kenakalan remaja semakin meningkat dan bervariasi seiring dengan kemajuan teknologi salah satunya internet, karena akses internet dijadikan sebagai media untuk menyerang orang lain. Berdasarkan informasi dari UNICEF Indonesia, menyatakan sekitar 41% anak di Indonesia mengalami kasus perundungan di sekolah setiap bulannya. Perundungan melibatkan adanya kekerasan fisik dan psikologis, termasuk yang dilakukan melalui media sosial. Kementerian PPA juga menarik kesimpulan bahwa sekitar 12-15% remaja laki-laki dan perempuan berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan melalui internet. Fenomena penyerangan atau perundungan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian di tingkat global. UNICEF mengungkapkan bahwa rata-rata 50% remaja di setiap negara di dunia mengalami kekerasan di sekolah, dan secara keseluruhan, satu dari tiga anak terlibat dalam pertengkaran fisik. Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa penyerangan, baik melalui media sosial maupun secara fisik, adalah masalah yang harus diselesaikan di semua negara, karena perilaku-perilaku ini membahayakan para remaja yang merupakan pewaris bangsa.

Selain tindakan agresif terhadap orang lain, masalah perilaku remaja yang mendapatkan perhatian nasional saat ini adalah penggunaan obat-obatan terlarang. Menurut *World Drugs Report* yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam (BNN, 2018), sekitar 275 juta penduduk dunia atau sekitar 5,6% dari total penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah menggunakan narkoba. BNN juga menyatakan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba pada tahun 2018 di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai 2,29 juta

orang. Salah satu kelompok yang rentan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berusia antara 15 hingga 35 tahun, yang sering disebut generasi milenial.

Data ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan dan mencerminkan arah perilaku yang negatif pada remaja saat ini. Selain perilaku penindasan dan penyalahgunaan narkoba, perilaku lain yang menunjukkan karakter yang tidak baik juga meluas, seperti balapan liar di jalan, membolos sekolah, vandalisme, pemerasan, dan pencurian. Semua ini masih menjadi masalah yang menghantui kalangan remaja. Berikut jumlah kasus anak yang terjadi sebagai pelaku dan Korban 2015 -2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1  
Kasus anak menjadi Pelaku dan Korban 2015-2017

Kasus	2015		2016		2017	
	Pelaku	Korban	Pelaku	Korban	Pelaku	Korban
Kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dan sebagainya)	81	197	108	146	112	173
Kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, dan sebagainya)	22	58	39	64	41	62
Kekerasan seksual (pemerksaan, pencabulan, sodomi/pedofilia)	157	218	146	192	168	188
Pembunuhan	36	59	48	72	51	64
Pencurian	81	34	43	56	57	55
Kecelakaan Lalu Lintas	52	74	71	94	76	93
Kepemilikan Bersenjata	48	23	28	23	52	23
Penculikan	6	16	8	36	8	34
Aborsi	19	16	48	64	53	58



Terorisme	0	15	0	16	4	17
<b>Total</b>	<b>502</b>	<b>710</b>	<b>539</b>	<b>763</b>	<b>622</b>	<b>767</b>

(Sumber: Hendrawan, 2019)

Tantangan yang dihadapi oleh seluruh bangsa terkait dengan watak kewarganegaraan telah menjadi isu nasional yang memerlukan kajian yang komprehensif untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu tindakan strategis yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah mempersiapkan seluruh warga negara agar memiliki watak kewarganegaraan yang positif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Watak kewarganegaraan yang harus dibangun dari seorang anak adalah disiplin dalam belajar yang merupakan suatu kesadaran dalam melakukan pekerjaan, mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku secara tertib dan teratur serta dengan penuh rasa tanggung jawab pada diri seorang anak. Arikunto dalam (Sari & Hadijah, 2017), mengemukakan beberapa jenis-jenis disiplin dalam belajar yang ditunjukkan dari perilaku seperti menaati peraturan sekolah, pendisiplinan di dalam kelas, pendisiplin dalam menepati jadwal pelajaran, dan belajar secara teratur.

Kedisiplinan peserta didik dalam belajar menjadi sumber pada diri mereka sendiri. Dengan dibuatnya tata tertib sekolah selaku upaya sekolah dalam membentuk kepribadian disiplin kepada peserta didik, perihal ini jadi tahapan berikutnya untuk orang tua guna membentuk karakter dari peserta didik tersebut. Disiplin juga akan berdampak yang baik bagi peserta didik untuk kedepannya. Kedisiplinan mempunyai tujuan yang mulia yang menunjang peranan dari pembelajaran nasional, namun setiap peserta didik memiliki tingkatan ketertiban atau disiplin yang berbeda-beda. Ketidaksamaan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi setiap peserta didik secara individual. Faktor-faktor ini termasuk pemahaman diri mengenai pentingnya hidup disiplin dan patuh terhadap aturan, yang merupakan langkah praktis untuk mengatur perilaku

seseorang. Faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi, mengubah, dan membentuk tingkah laku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, hukuman juga digunakan sebagai upaya untuk menyadarkan peserta didik dan membantu mereka mengevaluasi perilaku mereka agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. (Widi et al., 2017).

Saat ini, masih terdapat banyak perilaku kurang disiplin yang terjadi di dalam lingkungan sekolah, contohnya tidak memakai seragam sekolah yang lengkap yang sesuai dengan aturan dari sekolah tersebut, masih terdapatnya peserta didik yang terlambat datang ke sekolah, membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Hal ini menjadi tugas utama dari pihak sekolah dalam memperbaiki karakter disiplin dari seorang anak didik tersebut. Budaya sekolah yang menjadi suatu bentuk dari kesepakatan bersama yang diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sekolah guna menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki intelektual tinggi dan karakter yang baik. Budaya sekolah tentunya sebagai suatu sistem dalam pengenalan norma-norma, nilai-nilai dan asumsi yang mendasar yang harus ditaati dan dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah serta dapat memberikan ciri khas atau identitas yang membedakan dengan sekolah-sekolah lainnya (Sobri et al., 2019).

Kartu kendali atau kartu kontrol menjadi bagian dalam pendidikan karakter peserta didik di sekolah, melalui habitulasi yang menjadi budaya sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik. Kebijakan kartu kendali yang telah diterapkan di beberapa sekolah belum menggambarkan keberhasilan dan tidak adanya tindak lanjut dari sekolah tersebut. Kebijakan ini tidak digunakan lagi bahkan sudah dilupakan di sekolah-sekolah. SMA Negeri Bernas Binsus adalah salah satu sekolah yang berada di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang menerapkan sistem disiplin peserta didik dalam mentaati aturan dengan menggunakan kebijakan kartu kontrol. Kebijakan ini menjadi program unggulan sekolah ini dan bahkan satu-satunya sekolah yang ada di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau mempunyai kebijakan kartu kontrol.

Dalam menerapkan kebijakan ini, sekolah membuat tim disiplin untuk menindak lanjuti bagi yang melanggar aturan tata tertib sekolah.

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri Bernas Binsus Provinsi Riau dalam menerapkan kebijakan kartu kontrol peraturan sekolah dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik, sebagaimana data yang diperoleh dari sekolah yang berupa catatan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didiknya, yang mana catatan tersebut dikumpulkan setiap minggu untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati bersama. Dari data yang peneliti dapatkan bahwasanya pada minggu pertama bulan Februari 2023, pada kelas XII IPS 1 terdapat ada 23 peserta didik yang memiliki catatan pelanggaran yang dicatat oleh tim disiplin, dan pada minggu kedua bulan Februari 2023 pada kelas XII IPS 1 terdapat 13 peserta didik yang memiliki catatan pelanggaran. Kedua data tersebut terdapat perubahan yang signifikan terhadap jumlah peserta didik yang memiliki catatan pelanggaran tata tertib sekolah. Hal ini tentunya dengan adanya kebijakan kartu kontrol dapat meningkatkan keefektifan dalam kedisiplinan peserta didik serta kebijakan kartu kontrol dapat diterapkan di sekolah-sekolah lainnya yang ada di Provinsi Riau.

Dengan adanya kartu kontrol akan memudahkan guru dalam melakukan pemantauan terhadap peserta didik mengenai pelanggaran yang telah dilakukannya dan melihat sejauh mana tingkat kedisiplinan peserta didik di lingkungan sekolah. Berdasarkan dari data observasi tersebut maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan kartu kontrol peraturan sekolah dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik di SMA Negeri Bernas Binsus Provinsi Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut secara umum peneliti merumuskan masalah: Bagaimana penerapan kartu kontrol peraturan sekolah dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik di SMA Negeri Bernas Binsus Provinsi Riau. Adapun pertanyaannya secara khusus dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kartu kontrol peraturan sekolah dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik di SMA Negeri Bernas Binsus Provinsi Riau?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan kartu kontrol peraturan sekolah dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik di SMA Negeri Bernas Binsus Provinsi Riau?
3. Bagaimana upaya dalam penyelesaian kendala penerapan kartu kontrol peraturan sekolah dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik di SMA Negeri Bernas Binsus Provinsi Riau?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan kartu kontrol peraturan sekolah dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik di SMA Negeri Bernas Binsus Provinsi Riau
2. Menganalisis kendala dalam penerapan kartu kontrol peraturan sekolah dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik di SMA Negeri Bernas Binsus Provinsi Riau
3. Menganalisis upaya penyelesaian kendala penerapan kartu kontrol peraturan sekolah dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik di SMA Negeri Bernas Binsus Provinsi Riau

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat dari Segi Teoritis**

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan, menggali, dan mengkaji serta dapat menjadi contoh atau sebagai sumber referensi bagi sekolah lain yang dapat memberikan pengembangan karakter peserta didik yang mandiri, jujur, disiplin dan tanggung jawab.

### **1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan**

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi mengenai pendidikan karakter secara menyeluruh baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, guna membangun dan mengembangkan kualitas terhadap pendidikan melalui kebijakan yang dibuat sekolah tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dalam membentuk karakter peserta didik.

### **1.4.3 Manfaat dari Segi Praktik**

Penelitian ini memiliki manfaat mampu memberikan pedoman kepada peserta didik sejauh mana mereka menerapkan karakter atau watak menjadi warga negara yang baik, dan taat kepada tata tertib sekolah dengan melihat kartu kontrol mereka yang telah diberikan kepada masing-masing peserta didik oleh pihak sekolah.

### **1.4.4 Manfaat dari Segi Isu Serta Aksi Sosial**

Dari segi isu dan aksi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak berikut:

1. Bagi masyarakat umum, menjadi bahan refleksi dan motivasi dalam mengambil tindakan dan upaya dalam membentuk dan melahirkan generasi yang berkarakter sebagai masyarakat yang disiplin taat pada aturan dan beradab serta bertanggung jawab.

2. Bagi akademisi dan praktisi pendidikan untuk menjadi bahan implementasi dalam membentuk karakter anak yang bisa diterapkan bukan hanya disekolah pilihan tetapi seluruh sekolah di Indonesia.
3. Bagi pemerintah daerah khususnya wilayah Kabupaten Pelalawan agar dapat memberikan dukungan baik materil maupun non material dalam hal program yang menunjang pembangunan karakter dari peserta didik maupun kepada masyarakat daerah.

### 1.5 Struktur Organisasi Proposal Tesis

Dalam penulisan penyusunan karya ilmiah Tesis ini yang dilakukan oleh penulis dengan membagi dalam struktur organisasi Tesis, dalam hal ini meliputi halaman, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan yang mengacu pada pedoman dalam penulisan karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019 sistematika proposal penulisan tesis yang dapat dijelaskan yaitu:

Bab pertama yaitu Pendahuluan, yaitu bagian yang memuat latar belakang permasalahan mengenai penerapan kartu kontrol peraturan sekolah dalam pembentukan *civic disposition* peserta didik di SMA Negeri Bernas Binsus Provinsi Riau, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan struktur organisasi tesis yang memuat sistematika penulisan tesis.

Bab kedua yaitu Kajian Teori, yaitu yang mengupas mengenai teori-teori yang ditemukan oleh penulis, pendapat para ahli, serta penelitian relevan menjadi sebagai acuan dalam penelitian yang penulis lakukan. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis secara mendalam serta menjelaskan penelitian melalui kerangka berfikir guna untuk mendapatkan fokus penelitian yang terarah.

Bab ketiga yaitu Metode penelitian, yaitu yang memaparkan bagaimana cara dan langkah-langkah yang digunakan peneliti, serta pendekatan penelitian sebagai langkah pertama, menentukan metode yang

digunakan dari penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik dalam pengumpulan data, instrumen penelitian, cara teknik pengolahan, menganalisis data, uji keabsahan data, serta prosedur penelitian yang mengacu pada rumusan masalah yang diteliti.

Bab empat berisikan temuan dan pembahasan hasil deskripsi temuan yang peneliti peroleh berupa fakta di lapangan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori dan didukung dengan data-data yang diperoleh oleh peneliti.

Bab lima yaitu terdiri dari simpulan, implikasi, dan rekomendasi. pada bagian simpulan, yang mana peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap hasil temuannya. Selanjutnya peneliti akan memaparkan implikasi dari hasil penelitian. Terakhir peneliti memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang dianggap penting dalam penelitian.